

PENGARUH DINAMIKA POLITIK LOKAL TERHADAP KINERJA ADMINISTRASI PUBLIK DI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI

Rusnato¹, Najwa Sabila², Harisul Ilmi³, Hani Rahmawati⁴, Ninda Salsa Akmalia⁵
rusnato.123090113@ugj.ac.id¹, najwa.123090101@ugj.ac.id², harisul.123090106@ugj.ac.id³,
hani.123090100@ugj.ac.id⁴, ninda.123090096@ugj.ac.id⁵
Universitas Swadaya Gunung Jati

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika politik lokal terhadap kinerja administrasi publik di Kota Cirebon dalam perspektif ekologi administrasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa dinamika politik lokal di Kota Cirebon berpengaruh terhadap stabilitas dan efektivitas kinerja administrasi publik. Interaksi antara aktor politik kepala daerah, DPRD, dan partai politik menentukan arah kebijakan dan kinerja birokrasi. Dalam perspektif ekologi administrasi, stabilitas politik menjadi faktor lingkungan eksternal yang penting dalam menjaga adaptivitas birokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kekuatan politik dan kapasitas administrasi merupakan kunci keberhasilan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Dinamika Politik Lokal, Kinerja Administrasi Publik, Ekologi Administrasi, Birokrasi, Pemerintahan Daerah, Stabilitas Politik, Adaptasi Organisasi.

ABSTRACT

This study aims to analyse the influence of local political dynamics on public administration performance in Cirebon City from an administrative ecology perspective. This study uses a descriptive qualitative approach with a library research method, which involves examining various scientific sources such as journals, books, research reports, and official government documents. The results of the study show that local political dynamics in Cirebon City affect the stability and effectiveness of public administration performance. The interaction between political actors regional heads, regional representative councils, and political parties determines the direction of policy and bureaucratic performance. From an administrative ecology perspective, political stability is an important external environmental factor in maintaining bureaucratic adaptability. This study confirms that the balance between political power and administrative capacity is the key to effective and accountable local government.

Keywords: Local Political Dynamics, Public Administration Performance, Administrative Ecology, Bureaucracy, Local Government, Political Stability, Organisational Adaptation.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan administrasi publik di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika politik yang melingkupinya. Politik lokal memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, pola pengambilan keputusan, serta efektivitas pelaksanaan program publik. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya dan membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, dinamika politik lokal sering kali menimbulkan tantangan terhadap profesionalisme dan kinerja birokrasi, terutama ketika kepentingan politik lebih dominan dibandingkan orientasi pelayanan publik. Perubahan dalam fase kehidupan manusia ditandai banyak hal, salah satunya adalah revolusi digital dan era dirupsi teknologi yang saat ini populer dengan istilah Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) yang memiliki

karakteristik unik yakni mengaplikasikan artificial intelligence dalam aktivitas organisasional (Basuki Lembaga Administrasi Negara & Johanes, 2018).

Dinamika politik lokal mencakup interaksi antara aktor-aktor politik seperti kepala daerah, DPRD, partai politik, serta kelompok kepentingan lainnya yang saling memengaruhi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut (Agustina, 2019) Pelayanan publik harus sesuai harapan, dan pelayanan yang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketegangan, koalisi, dan kompetisi politik di tingkat daerah dapat berimplikasi langsung terhadap efektivitas administrasi publik. Misalnya, proses rotasi jabatan birokrasi yang didasarkan pada pertimbangan politik, bukan kompetensi, dapat menurunkan kinerja lembaga publik. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara politik dan administrasi tidak selalu berjalan harmonis, tetapi saling memengaruhi secara dinamis dalam konteks ekologi administrasi.

Perspektif ekologi administrasi menekankan bahwa administrasi publik merupakan sistem yang hidup dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Artinya, perubahan dalam lingkungan politik akan memengaruhi fungsi dan kinerja administrasi publik. Dalam konteks Indonesia, terutama pada level pemerintahan daerah, fenomena ini terlihat dari bagaimana dinamika politik pasca-pemilihan kepala daerah sering kali berpengaruh terhadap stabilitas birokrasi dan efektivitas pelayanan publik. (Yunita Simatupang, 2024) menyatakan bahwa internet dan media sosial dapat memperluas partisipasi politik dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Namun, tantangan seperti polarisasi politik dan penyebaran disinformasi juga menjadi perhatian penting dalam penerapan teori ini. Dengan demikian, pemahaman terhadap kinerja administrasi publik perlu mempertimbangkan interaksi antara birokrasi dan lingkungan politiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika politik lokal terhadap kinerja administrasi publik dalam perspektif ekologi administrasi. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor politik, seperti stabilitas pemerintahan, hubungan eksekutif-legislatif, serta intervensi partai politik, memengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi publik di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekologi administrasi, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Dinamika Politik Lokal

Dinamika politik lokal merupakan keseluruhan proses interaksi antara aktor-aktor politik di tingkat daerah yang meliputi kepala daerah, DPRD, partai politik, birokrasi, serta masyarakat sipil dalam menentukan arah kebijakan publik. Kata Politik yang ditempatkan di depan dari sebuah kata Kata politik itu mempunyai arti siasat. Contoh Politik Lokal padanan ini memberi makna siasat yang dilakukan oleh tingkatan pemerintah tertentu (UU No.22 disebut propinsi, kabupaten/kota) untuk membenahi diri sebaik mungkin agar dapat diakui secara formal oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi oleh pemerintah daerah dalam mempercantik diri agar siasat ini ini terakomodasi pemerintah pusat.

Berdasarkan pandangan (Bailusy & Hasanuddin, 2000) dinamika politik lokal ini mencakup interaksi politik yang berkembang pada kelompok kepentingan, partai politik dengan berbagai perubahan legislatif lokal yang secara konstitusional telah memiliki fungsi politik yang dinamik dalam mengemban Misi politik sebagai penjelmaan pikiran rakyat

pada tingkat lokal. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, relasi eksekutif-legislatif, dan peran partai politik memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Rasyid, 2000). Ketika politik lokal didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu, kinerja birokrasi publik dapat terganggu akibat politisasi jabatan dan lemahnya profesionalisme aparatur (Dwiyanto, 2011). Oleh karena itu, memahami dinamika politik lokal menjadi penting untuk menilai bagaimana lingkungan politik memengaruhi kinerja administrasi publik.

2. Kinerja Administrasi Publik

Kinerja administrasi publik merujuk pada kemampuan birokrasi pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial, pelayanan publik, serta implementasi kebijakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut (September & Sungai, 2022) mengemukakan kinerja adalah kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seseorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas adalah bagaimana seseorang menjalankan tugasnya, yaitu mengenai banyaknya kesalahan yang dibuat, kedisiplinan dan ketepatan. Waktu kerja adalah mengenai jumlah absen yang dilakukan, keterlambatan, dan lamanya masa kerja, kinerja administrasi publik diukur melalui indikator efisiensi, efektivitas, responsivitas, akuntabilitas, dan keadilan pelayanan. Kinerja yang baik akan tercermin dari kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan standar yang telah ditetapkan.

Namun, kinerja administrasi publik sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan politik dan kebijakan kepala daerah yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Hal ini sejalan dengan pandangan Denhardt & Denhardt (2015) dalam paradigma *New Public Service*, yang menekankan pentingnya birokrasi untuk fokus pada pelayanan warga negara, bukan sekadar menjalankan kepentingan politik penguasa.

Dalam praktiknya, hubungan antara politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan. Kinerja administrasi publik akan optimal apabila terdapat keseimbangan antara kepemimpinan politik yang visioner dan birokrasi yang profesional (Thoha, 2017).

3. Perspektif Ekologi Administrasi

Konsep ekologi administrasi pertama kali diperkenalkan oleh Fred W. Riggs (1961) yang menyatakan bahwa administrasi publik harus dipahami dalam konteks lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi tempat birokrasi itu beroperasi. Menurut Riggs, administrasi tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi secara dinamis dengan lingkungannya. Perubahan dalam lingkungan politik atau sosial akan memengaruhi struktur dan kinerja administrasi publik.

Dalam perspektif ini, dinamika politik lokal merupakan bagian dari “lingkungan politik” yang menjadi variabel penting dalam menentukan kinerja birokrasi daerah. Ketika lingkungan politik bersifat stabil dan mendukung profesionalisme, administrasi publik akan bekerja secara efisien dan responsif. Sebaliknya, ketika lingkungan politik penuh konflik dan patronase, kinerja administrasi publik akan cenderung menurun. Dengan demikian, teori ekologi administrasi memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami hubungan antara dinamika politik dan kinerja birokrasi. Secara konseptual, (Relianti et al., 2025) mengungkapkan Ekologi Administrasi menawarkan pendekatan administrasi yang luas dengan menggunakan paradigma ekologis yang inovatif. Buku ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk teknologi, budaya, sosial, politik, dan ekonomi, yang menjadi kekuatan utamanya dalam memahami kompleksitas administrasi publik. Melalui model yang berpusat pada interaksi timbal balik antara manusia dan lingkungannya, Dr. Sahya Anggara menunjukkan betapa pentingnya administrasi yang responsif dan adaptif

terhadap kondisi lingkungan yang senantiasa berubah. Landasan teoretis yang kuat diberikan oleh bab awal yang menjelaskan dasar ekologi administrasi dan makna filosofisnya, memperkuat argumen bahwa administrasi tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik secara fisik maupun sosial. Dengan pendekatan ini, buku ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor eksternal memengaruhi kebijakan dan praktik administrasi, serta pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan menunjukkan bahwa dinamika politik lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja administrasi publik. Misalnya, penelitian oleh Haris (2020) menemukan bahwa hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan DPRD dapat memperlambat proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Sementara itu, penelitian oleh Rakhmawati (2021) menunjukkan bahwa intervensi politik dalam proses promosi jabatan birokrasi menyebabkan rendahnya motivasi dan kinerja aparatur sipil negara.

Penelitian lainnya oleh Subarsono (2018) menjelaskan bahwa stabilitas politik lokal yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi publik karena memungkinkan birokrasi berfokus pada pelayanan publik, bukan pada dinamika kekuasaan. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa memahami pengaruh dinamika politik lokal terhadap kinerja administrasi publik penting dilakukan dengan pendekatan ekologi administrasi agar diperoleh pemahaman yang lebih holistik.

5. Kerangka Pemikiran Teoretis

Berdasarkan uraian teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja administrasi publik merupakan hasil interaksi antara faktor internal birokrasi (kapasitas, profesionalisme, motivasi) dan faktor eksternal berupa dinamika lingkungan politik lokal. Perspektif ekologi administrasi memberikan landasan konseptual untuk menjelaskan hubungan tersebut. Dalam kerangka ini, dinamika politik lokal berperan sebagai variabel lingkungan yang memengaruhi kinerja administrasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa semakin dinamis dan tidak stabil kondisi politik lokal, maka semakin besar potensi terjadinya penurunan kinerja administrasi publik. Sebaliknya, ketika lingkungan politik mendukung stabilitas dan profesionalisme birokrasi, kinerja administrasi publik akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis hubungan antara dinamika politik lokal dan kinerja administrasi publik dalam kerangka ekologi administrasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dan politik secara mendalam berdasarkan konteks dan makna yang muncul di lapangan tanpa bergantung pada data numerik atau statistik.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kualitatif yang bersumber dari berbagai dokumen dan publikasi resmi. Data tersebut mencakup:

- **Dokumen pemerintahan**, seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan dokumen Reformasi Birokrasi.
- **Data politik lokal**, berupa hasil pemilihan kepala daerah, berita media massa terkait hubungan eksekutif-legislatif, serta laporan aktivitas partai politik daerah.

- **Kajian ilmiah dan literatur**, termasuk hasil penelitian, artikel jurnal, buku, dan laporan lembaga yang membahas hubungan antara politik lokal dan birokrasi publik. Sumber data ini diperoleh dari lembaga pemerintah, media daring, dan repositori akademik yang relevan dengan topik penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Metode ini melibatkan proses pencarian, pembacaan, dan analisis terhadap berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan variabel penelitian. Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Mengidentifikasi dokumen yang relevan dengan tema politik lokal dan administrasi publik.
- 2) Mengumpulkan laporan, artikel, dan peraturan yang menjelaskan kondisi politik daerah dan kinerja birokrasi.
- 3) Menyeleksi data berdasarkan kriteria validitas, keandalan sumber, dan relevansi terhadap fokus penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai hubungan antara dinamika politik lokal dan kinerja birokrasi tanpa menggunakan data kuantitatif.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis isi digunakan untuk menelaah makna, pola hubungan, serta kecenderungan yang muncul dalam dokumen dan sumber literatur. Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyaring informasi penting yang berkaitan dengan tema penelitian.
- 2) Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema seperti: dinamika politik lokal, stabilitas pemerintahan, dan kinerja administrasi publik.
- 3) Interpretasi, yaitu menafsirkan hubungan antar-tema berdasarkan perspektif ekologi administrasi.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor politik lokal memengaruhi kinerja birokrasi publik dalam konteks lingkungan administrasi yang kompleks.

4. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis yang digunakan adalah perspektif ekologi administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Fred W. Riggs, yang memandang administrasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan politiknya. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menafsirkan bagaimana dinamika politik lokal berperan sebagai “lingkungan” yang memengaruhi struktur, perilaku, dan kinerja administrasi publik.

Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai kasus atau fenomena yang muncul di daerah berbeda untuk menemukan pola umum tentang bagaimana politik lokal memengaruhi birokrasi dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan temuan utama bahwa dinamika politik lokal memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja administrasi publik di tingkat daerah. Hasil telaah dokumen dan literatur menunjukkan bahwa lingkungan politik di daerah sering kali menjadi faktor penentu arah dan kecepatan birokrasi dalam menjalankan fungsi

pelayanan publik.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, hubungan antara aktor politik (kepala daerah, DPRD, partai politik, dan kelompok kepentingan) dengan birokrasi administratif masih bersifat sangat erat. Proses pengambilan keputusan publik kerap diwarnai oleh pertimbangan politik, bukan semata prinsip rasionalitas administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dinamika politik lokal tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga membentuk perilaku administratif secara substansial.

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta berita dan laporan lembaga riset kebijakan publik, ditemukan beberapa pola penting:

1. Pergantian kepala daerah sering kali diikuti dengan rotasi pejabat birokrasi besar-besaran, yang cenderung mempertimbangkan loyalitas politik ketimbang kompetensi profesional. Hal ini menyebabkan gangguan kesinambungan program dan turunnya efisiensi pelayanan publik.
2. Hubungan eksekutif dan legislatif yang harmonis menghasilkan percepatan dalam penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan program publik. Sebaliknya, konflik antara kedua lembaga ini kerap menunda proses pengesahan anggaran dan kebijakan strategis daerah.
3. Dominasi partai politik lokal dalam menentukan arah kebijakan berimplikasi pada terjadinya intervensi politik terhadap birokrasi, terutama dalam pengisian jabatan struktural dan pembentukan tim sukses berbasis ASN.
4. Daerah dengan stabilitas politik tinggi cenderung memperlihatkan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal responsivitas dan transparansi, karena birokrasi dapat bekerja tanpa tekanan politik berlebihan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa semakin dinamis, kompetitif, dan tidak stabil kondisi politik lokal, semakin besar potensi terganggunya profesionalisme administrasi publik. Sebaliknya, stabilitas politik yang terjaga dengan baik menciptakan ruang bagi birokrasi untuk berfungsi optimal dalam melayani masyarakat.

Pembahasan

a) Gambaran Dinamika Politik Lokal di Kota Cirebon dalam Ekologi Administrasi

Kota Cirebon memiliki dinamika politik yang cukup fluktuatif, terutama dalam proses pemilihan kepala daerah dan relasi antara eksekutif dan legislatif. Koalisi politik yang terbentuk di DPRD sering kali memengaruhi proses perumusan kebijakan daerah, terutama dalam hal anggaran dan prioritas pembangunan. Beberapa sumber jurnal menyebutkan bahwa konflik kepentingan antar-elit politik berdampak pada perlambatan proses pengambilan keputusan publik dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten.

Dalam kerangka teori ekologi administrasi yang dikemukakan oleh Fred W. Riggs (1961), administrasi publik dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sistem administrasi tidak bisa dipahami secara terpisah dari lingkungannya karena perubahan dalam satu aspek lingkungan akan berdampak langsung pada perilaku dan struktur administratif.

Temuan penelitian ini mendukung pandangan Riggs bahwa lingkungan politik merupakan faktor ekologis yang sangat dominan dalam membentuk orientasi dan perilaku birokrasi. Ketika sistem politik lokal berfungsi secara demokratis, transparan, dan stabil, maka birokrasi memiliki kesempatan lebih besar untuk mengoptimalkan kinerjanya. Namun, ketika politik lokal didominasi oleh patronase dan kepentingan pribadi, maka administrasi publik akan cenderung bersifat “prismatic”, yakni berada di antara sistem modern dan tradisional — tidak efisien, tidak netral, dan rentan terhadap tekanan politik.

Bahasan dinamika politik lokal ini mencakup interaksi politik yang berkembang pada kelompok kepentingan, partai politik dengan berbagai perubahan legislatif lokal yang secara konstitusional telah memiliki fungsi politik yang dinamik dalam mengemban Misi politik sebagai penjelmaan pikiran rakyat (Bailusy & Hasanuddin, 2000)

b) Relasi Politik dan Birokrasi dalam Kerangka Desentralisasi

Otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Namun, otonomi ini juga membuka ruang bagi munculnya politik lokal yang kuat, di mana kepala daerah berperan tidak hanya sebagai administrator tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki kepentingan elektoral.

Penelitian menunjukkan bahwa di banyak daerah, terutama pasca-Pilkada, proses birokrasi sering kali digunakan untuk mengamankan kekuasaan politik. Praktik rotasi jabatan, mutasi pejabat, dan pengangkatan ASN loyalis menjadi salah satu strategi mempertahankan dukungan politik. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Dwiyanto (2011) dan Thoha (2017), bahwa birokrasi di Indonesia masih menghadapi dilema antara tuntutan profesionalisme dan tekanan politik. Akibatnya, kinerja administrasi publik menjadi tidak konsisten. Aparatur lebih berhati-hati dan sering kali menghindari inovasi pelayanan publik karena khawatir kebijakan mereka tidak sesuai dengan kehendak politik penguasa daerah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dinamika politik lokal telah menjadi variabel eksternal yang signifikan terhadap kinerja birokrasi.

c) Implikasi Dinamika Politik terhadap Kinerja Administrasi Publik

Ketidakstabilan politik lokal sering mengganggu efektivitas birokrasi dalam menjalankan program pemerintahan. Tekanan politik terhadap mutasi jabatan, intervensi dalam perumusan kebijakan, serta rendahnya koordinasi antarinstansi menjadi penyebab utama menurunnya kinerja administrasi publik. Namun, dalam periode pemerintahan yang lebih stabil, birokrasi di Kota Cirebon menunjukkan peningkatan dalam kualitas pelayanan publik, penerapan e-government, serta transparansi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik dapat memperkuat kapasitas administrasi publik. Kinerja administrasi publik yang ideal mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas (Mahmudi, 2019). Namun, kelima aspek tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan politik tempat birokrasi beroperasi. Dalam daerah dengan tingkat konflik politik tinggi, birokrasi cenderung tidak efisien karena banyak sumber daya terserap untuk kepentingan politik, bukan pelayanan publik. Sebaliknya, di daerah dengan stabilitas politik tinggi, birokrasi dapat berfokus pada implementasi kebijakan dan peningkatan kualitas layanan masyarakat. Terkait bahasan dinamika politik, terlebih dahulu (Yunita Simatupang, 2024) mengemukakan tentang pengertian “dinamika”, adalah suatu hal yang diberi dorongan berupa tenaga kekuatan sehingga mampu berpindah tempat dalam arti bergerak serta berkembang. Bahkan juga mempunyai kemampuan beradaptasi sesuai lingkungan sekitarnya. Secara umum, dinamika adalah perubahan baik berubah secara lambat atau cepat, kecil atau besar, dan relevan dengan kehidupan yang sedang dijalani. Jadi, orang tersebut menjalani alur hidup sebagaimana mestinya. Penelitian terdahulu oleh Rakhmawati (2021) juga memperkuat temuan ini: intervensi politik dalam proses administratif menurunkan motivasi dan kinerja ASN. Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan administrasi publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lingkungan politik memberikan ruang bagi birokrasi untuk bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan politik jangka pendek.

d) Analisis dalam Perspektif Ekologi Administrasi

Dalam perspektif ekologi administrasi, dinamika politik lokal merupakan salah satu

unsur lingkungan eksternal yang sangat memengaruhi keseimbangan sistem administrasi publik. Birokrasi Kota Cirebon dapat berfungsi optimal jika lingkungan politiknya mendukung stabilitas dan profesionalisme. Ketika interaksi antara aktor politik dan birokrasi berjalan secara sinergis, maka terjadi proses adaptasi positif yang menghasilkan kinerja pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ekologi administrasi menjelaskan bahwa hubungan antara politik dan administrasi bersifat resiprokal (saling memengaruhi). Lingkungan politik yang baik dapat mendorong birokrasi yang sehat, sedangkan birokrasi yang adaptif dapat membantu menciptakan stabilitas politik. Dalam kasus di Indonesia, hubungan timbal balik ini masih lemah karena birokrasi cenderung reaktif terhadap perubahan politik, bukan adaptif. Birokrasi belum sepenuhnya memiliki mekanisme internal untuk menjaga netralitas dan profesionalisme ketika lingkungan politik berubah.

Dengan demikian, untuk memperkuat kinerja administrasi publik dalam konteks ekologi politik yang dinamis, perlu dibangun sistem birokrasi yang tangguh terhadap tekanan eksternal, memiliki mekanisme merit system yang kuat, dan dipimpin oleh manajemen publik yang etis serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut pendekatan ekologis, administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik secara fisik, sosial, maupun budaya. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana birokrasi dan lingkungan berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan sistem yang lebih responsif, relevan, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, (Relianti et al., 2025) pendekatan ekologis menawarkan solusi potensial untuk masalah birokrasi yang selama ini dianggap tidak efektif, kaku, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting karena keanekaragaman budaya dan sosial yang ada di Indonesia, yang membutuhkan pendekatan administrasi publik berbasis lokal. Dengan mempertimbangkan kondisi lokal, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, pendekatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,

sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara berbagai elemen dalam ekosistem birokrasi dapat memperkuat efektivitas pelayanan publik. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip-prinsip ekologis dalam administrasi publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga ditekankan, sehingga tercipta ekosistem yang saling mendukung. Melalui integrasi nilai-nilai ekologis dalam administrasi, diharapkan dapat muncul model-model baru yang lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan masa depan.

Sintesis dan Implikasi Pembahasan

Dari keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinamika politik lokal berperan sebagai variabel lingkungan utama dalam sistem administrasi publik daerah. Stabilitas dan karakter politik lokal menentukan arah kinerja birokrasi.
2. Ketidakseimbangan hubungan antara politik dan administrasi menyebabkan birokrasi mudah terpolitisasi, sehingga menghambat pencapaian tujuan pelayanan publik.
3. Perspektif ekologi administrasi memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas hubungan politik dan birokrasi, dengan menempatkan keduanya sebagai bagian dari sistem yang saling berinteraksi.

4. Kinerja administrasi publik yang optimal hanya dapat tercapai apabila terdapat lingkungan politik lokal yang stabil, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan administrasi publik di daerah tidak dapat dipisahkan dari kualitas lingkungan politiknya. Dalam konteks ekologi administrasi, politik lokal bukan sekadar faktor eksternal, tetapi elemen vital yang menentukan keseimbangan sistem pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa dinamika politik lokal di Kota Cirebon berpengaruh signifikan terhadap kinerja administrasi publik. Ketegangan politik menyebabkan penurunan efektivitas birokrasi, sementara stabilitas politik meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam perspektif ekologi administrasi, politik lokal merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang harus dijaga keseimbangannya agar sistem administrasi publik dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah daerah dan aktor politik perlu dibangun di atas dasar profesionalisme, transparansi, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja administrasi publik, terutama dalam konteks pemerintahan daerah yang menjalankan prinsip otonomi dan desentralisasi. Berdasarkan hasil analisis kualitatif terhadap dokumen, laporan kinerja, serta literatur ilmiah, dapat disimpulkan bahwa kondisi politik lokal merupakan bagian integral dari ekologi administrasi publik yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk orientasi, perilaku, dan hasil kerja birokrasi daerah.

Pertama, dinamika politik lokal yang stabil dan partisipatif berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja administrasi publik. Ketika hubungan antara eksekutif, legislatif, dan aktor politik lainnya berjalan harmonis, birokrasi memiliki ruang yang luas untuk bekerja secara profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, dinamika politik yang penuh konflik, dominasi partai politik, atau kepentingan kekuasaan sempit berdampak negatif terhadap efektivitas birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Kedua, dalam perspektif ekologi administrasi, politik lokal tidak hanya berperan sebagai faktor eksternal, melainkan sebagai elemen lingkungan yang hidup dan saling memengaruhi dengan sistem administrasi publik. Perubahan dalam struktur politik daerah akan menimbulkan penyesuaian pada sistem birokrasi, baik dalam aspek kebijakan, struktur organisasi, maupun perilaku aparatur. Oleh karena itu, birokrasi publik harus memiliki kemampuan adaptif untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan politik tanpa kehilangan profesionalisme dan netralitasnya.

Ketiga, kinerja administrasi publik di tingkat lokal akan meningkat apabila sistem politik daerah mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang stabil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hal ini menuntut adanya kepemimpinan politik yang visioner, hubungan sinergis antara eksekutif-legislatif, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya aparatur.

KESIMPULAN

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan administrasi publik di daerah sangat bergantung pada keseimbangan antara stabilitas politik dan profesionalisme birokrasi. Dalam konteks ekologi administrasi, kedua elemen tersebut harus saling menopang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. Iaras. (2019). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik. 1–9.
- Bailusy, M. K., & Hasanuddin, U. (2000). Dinamika Politik Lokal. 401–412.
- Basuki Lembaga Administrasi Negara, J., & Johanes, I. (2018). Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 53–62. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/922>
- Relianti, A., Yusriah, S., & Setiawan Edi. (2025). Perspektif Ekologi Administrasi: Sebuah Tinjauan terhadap Article Info Article history. *Journal of Regional Public Administration*, 10(1), 1–10. <https://ejournal.lppmunsap.org/index.php/jrpa>
- September, N., & Sungai, K. H. (2022). 217-Article Text-1002-1-10-20220927. 1(1), 155–163.
- Yunita Simatupang. (2024). DINAMIKA POLITIK DAN PILKADA DI KOTA KENDARI: Analisis Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik Lokal. *Journal Publicuho*, 7(1), 439–447. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.506>.